

# **PENGARUH BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TERHADAP PRODUCT DOMESTIK REGIONAL BRUTTO (PDRB) DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KABUPATEN SINJAI**

**Oleh: Ilyas**  
**Dosen STISIP Muhammadiyah Sinjai**

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sinjai, Serta untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sinjai.

Variabel-variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi: 1) Belanja Langsung, 2) Belanja Tidak Langsung, 3) PDRB, serta 4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Data dianalisis dengan memakai model analisis Two Stage Least Square (2SLS Analysis) dengan menggunakan program SPSS 16. Sumber data utama berasal dari publikasi Biro Pusat Statistik Kabupaten Sinjai.

Hasil penelitian menunjukkan belanja langsung dan belanja tidak langsung secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Product Domestik Regional Brutto* (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sinjai.

**Kata kunci:** *Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, PDRB, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*

## **A. Pendahuluan**

### **1. Latar belakang**

Era sentralisasi pembangunan telah berakhir, digantikan oleh era desentralisasi. Tahun 2001 menjadi momentum yang sangat penting bagi negeri ini dan terkhusus kepada setiap daerah untuk melakukan akselerasi pembangunan. Belenggu sentralisasi yang selama ini diyakini sebagai salah satu faktor penghambat dalam proses pembangunan dapat diselesaikan dengan dibukanya krang otonomi daerah (Otoda).

Otonomi daerah memberikan keleluasaan dan kebebasan bagi setiap pemerintah daerah untuk melakukan kreatifitas dan inovasi dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah didorong untuk dapat

mengatur dan mengurus pos penerimaan dan pengeluaran daerah secara mandiri.

Pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi fiskal di Indonesia mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang direvisi menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Kedua undang-undang di bidang otonomi daerah tersebut telah menetapkan pemberian kewenangan otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Pemerintah daerah diberi

wewenang untuk menggali potensi daerahnya dan menetapkan prioritas pembangunan (Maharani, 2010).

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Artinya bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggarannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. (Darise, 2009).

Prosedur penyusunan pengeluaran pemerintah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

yang disempurnakan dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007. Peraturan ini dikeluarkan atas dasar berbagai kelemahan yang ditemui dalam implementasi Kepmen 29 Tahun 2002. Salah satu kelemahan dalam Kepmen 29 adalah tumpang tindihnya sumber pembiayaan berbagai kegiatan, sehingga dengan peraturan yang baru tersebut diharapkan mampu mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut (Nursini, 2012).

Peran kebijakan fiskal pemerintah sangat vital dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari peningkatan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kebijakan fiskal yang tergambar pada kebijakan anggaran untuk pengeluaran pemerintah (*goverment expenditure*) yakni belanja langsung dan belanja tidak langsung dapat menggambarkan bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya.

Semakin besar porsi alokasi anggaran pemerintah daerah mencerminkan semakin besar perhatian pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya, begitupun sebaliknya.

Dari data yang pernah dirilis oleh BPS Kabupaten Sinjai menunjukkan alokasi belanja pemerintah bersifat fluktuatif. Untuk belanja langsung sejak tahun 2007 sampai 2009 terus mengalami peningkatan. Tahun 2007 alokasi anggarannya sebesar Rp. 278.083.183, tahun 2008 sebesar Rp. 299.354.396, dan pada tahun 2009 sebesar Rp. 220.125.093. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2010 sebesar Rp. 204.595.720. selanjutnya pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp. 221.794.593.

dan terakhir pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar Rp. 200.357.566.

Selanjutnya untuk belanja tidak langsung dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Bahkan peningkatannya cukup signifikan. Misalnya saja pada tahun 2007 alokasi anggarannya sebesar Rp 173.537.693, kemudian naik menjadi Rp 205.025.090, pada tahun 2008, naik lagi menjadi Rp. 232.719.642 tahun 2009, tahun 2010 sebesar Rp. 245.881.174, tahun 2011 menjadi Rp305.885.672. dan terakhir pada tahun 2012 sudah mencapai Rp. 365.433.390.

Selanjutnya untuk melihat keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan melihat pertumbuhan ekonomi serta peningkatan IPM masyarakat di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tercermin pada PDRB yang terus meningkat serta IPM yang juga meningkat mengindikasikan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat dikatakan berhasil.

Berdasarkan data yang pernah dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Sinjai tentang pertumbuhan ekonomi dan IPM Kabupaten Sinjai dari tahun ke tahun sejak tahun 2007 sampai 2012 terus mengalami peningkatan. Jika disandingkan antara data pengeluaran atau belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan data pertumbuhan ekonomi dan IPM dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi di Kabupaten Sinjai dapat dikatakan berhasil. Tapi hal yang menjadi catatan penting adalah bahwa ternyata pertumbuhan IPM Sinjai masih tergolong rendah. Kualitas modal manusia yang terlihat dari IPM peningkatannya masih lambat, padahal pengeluaran pemerintah

dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Berangkat dari fenomena inilah yang kemudian membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Product Domestik Regional Brutto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sinjai”.

## 2. Rumusan Masalah

Mencermati latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah belanja langsung dan belanja tidak langsung berpengaruh terhadap *Product Domestik Regional Brutto* (PDRB) Kabupaten Sinjai?
- b. Apakah *Product Domestik Regional Brutto* (PDRB) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sinjai?

## 3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap *Product Domestik Regional Brutto* (PDRB) Kabupaten Sinjai.
- b. Untuk mengetahui pengaruh *Product Domestik Regional Brutto* (PDRB) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sinjai.

## 4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan

dan menjadi bahan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan khususnya bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

- b. Diharapkan dapat dijadikan bahan informasi bagi pembuat kebijakan dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dalam rangka mengambil kebijakan dalam mengatur pengalokasian anggaran untuk pembangunan di Kabupaten Sinjai.
- c. Menjadi sumber informasi bagi Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA), untuk menyusun rencana pembangunan di Kabupaten Sinjai.

## **B. Tinjauan Kepustakaan**

### **1. Tinjauan Teoritis**

#### **a. Pengeluaran Daerah**

Pengeluaran daerah atau Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Klasifikasi belanja menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Klasifikasi ini terdiri atas dua yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial yang diwujudkan

melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar minimal.

Yang dimaksud dengan urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan pariwisata (Darise, 2009).

Belanja daerah dibagi atas dua yakni belanja langsung dan belanja tidak langsung.

#### **1) Belanja Langsung**

Belanja langsung adalah belanja yang penganggarannya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Karakteristik belanja langsung adalah:

- a) Dianggarkan untuk setiap program atau kegiatan yang diusulkan oleh SKPD.
- b) Jumlah anggaran belanja langsung suatu program atau kegiatan dapat diukur atau dibandingkan secara langsung dengan output program atau kegiatan yang bersangkutan.
- c) Variabilitas jumlah setiap jenis belanja langsung dipengaruhi oleh target kinerja atau tingkat pencapaian yang diharapkan dari program atau kegiatan yang bersangkutan.

Belanja langsung dibagi menurut jenis yang terdiri dari:

- a) Belanja pegawai, digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- b) Belanja barang/jasa, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan

kegiatan pemerintahan daerah berupa belanja habis pakai, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan sebagainya.

- c) Belanja modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

## 2) Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang penganggarannya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun anggaran sebagai konsekuensi dari kewajiban pemerintah daerah secara periodik kepada pegawai yang bersifat tetap (pembayaran gaji dan tunjangan) dan/atau kewajiban untuk pengeluaran belanja lainnya yang umumnya diperlakukan secara periodik.

Karakteristik belanja tidak langsung adalah dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun (bukan untuk setiap program atau kegiatan) oleh masing-masing SKPD serta jumlah anggaran belanja tidak langsung sulit diukur atau dibandingkan secara langsung dengan output program atau kegiatan tertentu.

### b. PDRB

Untuk mengukur atau menilai kinerja pembangunan di suatu daerah pada periode tertentu adalah menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai

tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, sedang PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada satu waktu tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan perhitungan atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi rill dari tahun ke tahun (Widodo, 2006).

Untuk menghitung PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan dan masing-masing dijelaskan berikut:

- 1) Pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Nilai tambah merupakan hasil pengurangan output dan input antara.
- 2) Pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji (balas jasa tenaga kerja), sewa tanah (balas jasa tanah), bunga modal (balas jasa modal) dan keuntungan (balas jasa kewirausahaan), semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.
- 3) Pendekatan pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari,

pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok, dan ekspor neto. (Widodo, 2006).

### c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dalam proses pertumbuhan ekonomi, lazimnya orang lebih menekankan arti penting akumulasi modal fisik. Semakin disadari bahwa pertumbuhan persedian modal nyata sampai batas-batas tertentu tergantung pada pembentukan modal manusia yaitu proses peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seluruh rakyat suatu negara. (Jhingan, 2008)

Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar; terlepas dari hal-hal yang lain, kedua hal itu merupakan hal yang sangat penting. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga; keduanya adalah hal yang fundamental untuk membentuk kemampuan manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan. Pada saat yang sama, pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Lebih jauh lagi, kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas, sementara keberhasilan pendidikan juga bertumpu pada kesehatan yang baik. Oleh karena itu, kesehatan dan pendidikan juga dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital, sebagai input produksi agregat. Peran

gandanya sebagai input maupun output menyebabkan kesehatan dan pendidikan sangat penting dalam pembangunan ekonomi (Todaro, 2002).

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, Morris D. Morris mengenalkan *Physical Quality of Life Indeks (PQLI)* atau Indeks Kualitas Hidup (IKH). IKH merupakan indeks gabungan dari tiga indikator: tingkat harapan hidup, angka kematian dan angka melek huruf. Sejak tahun 1990 United Nations for Development program (UNDP) mengembangkan suatu indeks yang sekarang dikenal dengan istilah Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Indeks). Indikator-indikator yang digunakan untuk menyusun indeks ini adalah: tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf masyarakat serta tingkat pendapatan rill berdasarkan daya beli masing-masing negara. Indeks ini besarnya antara 0 sampai dengan 1,0. Semakin mendekati 1 berarti IPM-nya tinggi, demikian sebaliknya. (Arsyad:2004)

### d. Teori Pengeluaran Pemerintah

Salah satu teori pengeluaran pemerintah adalah model pembangunan perkembangan pengeluaran pemerintah. Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan dan transportasi. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah oleh karena peranan swasta semakin besar akan menimbulkan banyak kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak. Selain itu pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang makin kompleks. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri akan menimbulkan semakin tingginya pencemaran atau polusi. Pemerintah harus turun tangan mengatur dan mengurangi dampak negatif dari polusi. Pemerintah juga harus melindungi buruh dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap PDB semakin besar dan persentase investasi pemerintah terhadap PDB akan semakin kecil. Pada tahap ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial, seperti program kesejahteraan hari tua dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Teori Rostow dan Musgrave adalah pandangan yang timbul dari pengamatan atas pengalaman pembangunan ekonomi yang dialami oleh banyak negara. Selain itu, tidak jelas apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi tahap atau beberapa tahap dapat terjadi secara simultan.

#### e. Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah dengan Product Domestik Regional Brutto (PDRB)

Pengeluaran Pemerintah (*Goverment Expenditure*) mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah mempunyai dasar teori yang dapat dilihat dari identitas keseimbangan pendapatan nasional yaitu  $Y = C + I + G + (X - M)$  yang merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian.

Dari persamaan di atas dapat ditelaah bahwa kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pendapatan nasional. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya. Tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati kebijakan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai. Melainkan harus diperhitungkan pula siapa yang akan terpekerjakan atau meningkat pendapatannya. Pemerintah perlu menghindari agar peningkatan perannya tidak melemahkan kegiatan pihak swasta (Dumairy, 1997).

Pengeluaran pemerintah dalam arti rill dapat dipakai sebagai indikator besarnya

kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak pengeluaran pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Menurut Wijaya (2000), pengeluaran pemerintah mempunyai efek pengganda (*multiplier effect*) dan merangsang kenaikan pendapatan nasional dan akan menaikkan pendapatan serta produksi secara berganda sepanjang perekonomian belum mencapai tingkat kesempatan kerja penuh (*full employment*) karena ia akan menaikkan permintaan agregatif didasarkan pada anggapan bahwa pengeluaran pemerintah tidaklah pada proyek-proyek yang dapat menghalangi atau menggantikan investasi sektor swasta.

#### **f. Hubungan Antara Product Domestik Regional Brutto (PDRB) dengan IPM**

Pengaruh pertumbuhan ekonomi yang tercermin pada peningkatan PDRB terhadap pembangunan manusia dihubungkan dengan atau dipengaruhi oleh 2 (dua) jalur utama, yaitu jalur aktivitas rumah tangga, mencakup rumah tangga serta berbagai organisasi kemasyarakatan serta jalur belanja dan kebijakan pemerintah.

Aktivitas rumah tangga memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan indikator pembangunan manusia melalui belanja rumah tangga untuk makanan, air bersih, pemeliharaan kesehatan dan sekolah (UNDP, 1996: Ramirez dkk, 1998: Ranis, 2004). Kecenderungan aktivitas rumah tangga untuk membelanjakan sejumlah faktor yang langsung berkaitan dengan indikator pembangunan manusia di atas dipengaruhi oleh tingkat dan distribusi pendapatan, tingkat pendidikan serta sejauhmana peran perempuan dalam mengontrol pengeluaran rumah tangga.

Ketika tingkat pendapatan atau PDB per kapita rendah akibat dari pertumbuhan ekonomi yang rendah, menyebabkan pengeluaran rumah tangga untuk peningkatan pembangunan manusia menjadi turun. Begitu juga sebaliknya, tingkat pendapatan yang relatif tinggi cenderung meningkatkan belanja rumah tangga untuk peningkatan pembangunan manusia. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ranis (2004), bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat langsung terhadap peningkatan pembangunan manusia melalui peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan akan meningkatkan alokasi belanja rumah tangga untuk makanan yang lebih bergizi dan pendidikan, terutama pada rumah tangga miskin. Dengan kata lain, peningkatan pendapatan menurut Sen (1999) memberikan kontribusi secara langsung terhadap peningkatan kapabilitas penduduk. Banyak studi menyebutkan, peningkatan pendapatan mendorong peningkatan kesehatan dan pendidikan. Studi di Brazil, Chile dan Nikaragua menunjukkan, bahwa peningkatan pendapatan berpengaruh terhadap peningkatan beberapa indikator tingkat kesehatan, seperti rasio usia dengan tinggi badan serta angka harapan hidup ketika lahir (UNDP, 1996; 68-69). Studi-studi lain juga menyebutkan, peningkatan pendapatan mempengaruhi tingkat pendidikan. Angka perkiraan di Brazil menyebutkan, bahwa 10% peningkatan pendapatan mempengaruhi 5% – 8% peningkatan pendidikan. Begitu juga di Pakistan, terdapat hubungan yang erat antara peningkatan pendapatan dengan rata-rata tahun pendidikan yang dapat diselesaikan. Studi Lee (1996) di Korea juga menghasilkan pengaruh yang signifikan tingkat pendapatan dan beberapa

variabel lainnya terhadap rata-rata tahun sekolah (*years of schooling*) penduduk.

## 2. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang hubungan antara pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas manusia atau IPM telah banyak dilakukan. Cahyadi (2005) menemukan bahwa pembangunan manusia sangat dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi, faktor pembiayaan pembangunan manusia, faktor kemiskinan, faktor pendidikan dan faktor kesehatan. Dalam kesimpulan dinyatakan bahwa anggaran pembangunan sosial dan rata-rata pengeluaran rumah tangga sebagai indikator pembiayaan pembangunan manusia berpengaruh signifikan secara positif terhadap IPM. Adapun salah satu rekomendasi kebijakan dari hasil penelitian tersebut untuk dijadikan strategi dalam meningkatkan pembangunan manusia adalah melalui kebijakan pemerintah daerah Kab/Kota dalam peningkatan presentase anggaran pembangunan sosial.

Selain itu, Yani Mulyaningsih (2008), Salah satu hasil penelitiannya adalah bahwa pengeluaran pemerintah di sektor publik terhadap pembangunan manusia terlihat arah koefisien yang negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan manusia. Hal tersebut terkait dengan masih rendahnya pengeluaran pemerintah di sektor publik terutama sektor pendidikan dan kesehatan.

Hadi Sasana (2009), Variabel endogen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja terserap, jumlah penduduk miskin, dan kesejahteraan dan

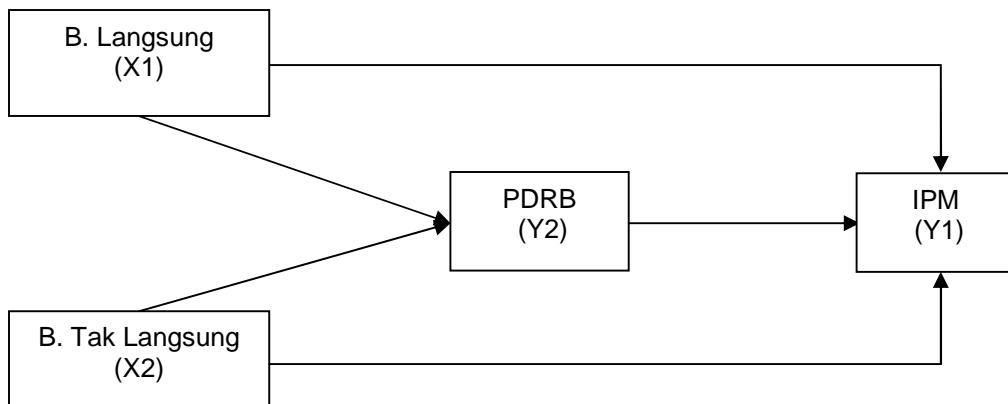
variabel eksogen dalam penelitian ini adalah desentralisasi fiskal. Hasil penelitian ini yaitu desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan positif terhadap tenaga kerja terserap, pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap jumlah penduduk miskin, pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kesejahteraan masyarakat, tenaga kerja terserap berpengaruh signifikan dan positif terhadap kesejahteraan masyarakat, jumlah penduduk miskin berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Adi Raharjo dengan judul Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Swasta, dan Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1982-2003 (Studi Kasus Di Kota Semarang). Variabel endogen pertumbuhan ekonomi dan variabel eksogen belanja rutin, belanja pembangunan pemerintah, investasi, dan angkatan kerja. Hasil dari penelitian ini adalah pengaruh pengeluaran pemerintah memiliki hubungan yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB).

Dari gambaran keempat penelitian di atas, di dapat kesimpulan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas manusia. Tingginya pengeluaran untuk sektor publik sangat berpengaruh terhadap peningkatan IPM dan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

## 3. Kerangka Pemikiran

Dari data yang tersedia, teori yang telah dijelaskan dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun kerangka pemikiran yaitu:



**Gambar: Kerangka Pemikiran**

#### 4. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara dari penelitian yang akan dilakukan. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- Belanja langsung dan belanja tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan *Product Domestik Regional Brutto* (PDRB) Kabupaten Sinjai.
- Product Domestik Regional Brutto* (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

#### C. Metode Penelitian

##### 1. Definisi Operasional Variabel

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah yang dinyatakan dalam satuan rupiah. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan pemerintah. Belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal dalam satuan ribu rupiah.

Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan pemerintah. Yang termasuk kedalam belanja tidak langsung adalah belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan, belanja banuan sosial, belanja tidak terduga dan ditunjukkan dalam satuan ribu rupiah.

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi yang dinyatakan dalam satuan rupiah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari: tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf masyarakat serta tingkat pendapatan rill berdasarkan daya beli masing-masing negara. Indeks ini besarnya antara 0 sampai dengan 1,0. Semakin mendekati 1 berarti IPM-nya tinggi, demikian sebaliknya.

##### 2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif diidentifikasi sebagai proses kerja yang berlangsung secara ringkas, sempit dan reduksionistik. Reduksionistik melibatkan pembedahan

atas keseluruhan menjadi bagian-bagian yang dapat diuji secara kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan untuk dilakukan untuk mengkaji pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi/ PDRB, dan IPM kabupaten sinjai. Untuk mengetahui pengaruh tersebut maka digunakan analisis Struktural Equation Models (SEM).

### 3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Kebutuhan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang berkaitan dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah seperti buku-buku, makalah, artikel, internet, laporan-laporan dan kepustakaan lainnya. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain: data belanja langsung dan belanja tidak langsung 2007-2012, data PDRB tahun 2007-2012, dan data IPM 2007-2012 Kabupaten Sinjai.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh melalui telaah kepustakaan dan hasil publikasi yaitu suatu bentuk penelitian yang menggunakan sarana kepustakaan dengan menelaah bahasan teoritis dari berbagai buku, buletin, artikel-artikel dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Begitu pentingnya data sebagai bahan baku analisis dan pengambilan keputusan maka data yang benar merupakan kebutuhan mutlak. Teknik pengumpulan data harus sesuai dengan kondisi yang dihadapi di lapangan sehingga memudahkan dalam analisis.

## 5. Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui pengaruh belanja sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap IPM,

pertumbuhan ekonomi (PDRB) maka digunakan analisis Two Stages Least Squares (2SLS analysis) . Adapun persamaan fungsional dalam model 2SLS analisis dapat dirumuskan sebagai berikut:

Dimana :

X<sub>1</sub> = Belanja Langsung (Rp)

$X_2$  = Belanja Tidak Langsung (Rp)

$Y_1$  = Produk Domestik Regional Bruto (Rp)

$$Y_2 = \text{IPM} (\%)$$

Berdasarkan model fungsional di atas, maka dibentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y_1 = \ln \theta_0 + \theta_1 \ln X_1 + \theta_2 \ln X_2 + \mu_1 \dots \dots \dots (1.4)$$

Untuk menghitung pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap IPM melalui PDRB maka persamaan (1.4) disubtitusi ke persamaan (1.5) dan persamaan

$$Y_2 = \ln \_0 + \_1 \ln X_1 + \_2 \ln X_2 + \_3 Y_1 + \mu_2 \dots \dots \dots (1.5)$$

$$Y_2 = (\ln_{00} + \ln_{03}) + (\ln_{11} + \ln_{13}) \ln X_1 + (\ln_{22} + \ln_{23}) \ln X_2 + (\mu_{13} + \mu_{23})$$

$$Y_2 = (\ln_0 + \ln_{-3}) + (\_1 + \_3) \ln X_1 + (\_2 + \_2 \\ \_3) \ln X_2 + (\mu_1 \_3 + \mu_2)$$

## **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

## 1. Gambaran Umum Kabupaten Sinjai

Kabupaten Sinjai adalah salah satu dari 24 Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan yang terletak di pantai timur bagian selatan jazirah Sulawesi Selatan yang berjarak  $\pm$  223 km dari kota Makassar (ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan). Kabupaten Sinjai yang memiliki luas 819,96 km<sup>2</sup> terdiri dari 9

Kecamatan defenitif dengan jumlah Desa sebanyak 67 dan 13 kelurahan.

Secara geografis Kabupaten Sinjai terletak antara 502'56" sampai 5021'16" Lintang Selatan dan antara 1190 56' 30" sampai 1200 25' 33" Bujur Timur. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone, di sebelah Timur dengan Teluk Bone, di sebelah Selatan dengan Kabupaten Bulukumba dan di sebelah Barat dengan Kabupaten Gowa.

## 2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis pengaruh variabel independen yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sinjai dilakukan dengan memakai alat analisis Two Stage Least Squares (2SLS) dengan menggunakan program SPSS 16. Untuk keperluan itu telah diformulasikan bahwa pada tahap ini akan diregresi model seluruh variabel independent terhadap variabel dependent.

Hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS 16, diperoleh hasil sebagai berikut:

### a. Analisis Tabel Model Summary

Tabel 1. Model Summary

Model R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The estimate
1	.967	.935	.891

Sumber data: Data Olahan SPSS 16.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) R atau Multiple R= 0,967

R atau Multiple R menunjukkan korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat sebesar 0,967, dalam hal ini karena analisis 2SLS

dengan dua variabel bebas maka korelasi antara belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap IPM melalui PDRB sebesar 0,936. Angka R sebesar 0,936 yang menjadi koefisien korelasi model ini, menunjukkan bahwa antara variabel independent dengan variabel dependent sangat kuat.

#### 2) R Square= 0,935

R Square atau koefisien determinasi sebesar 0,935 berarti bahwa variasi variabel independent (belanja langsung dan belanja tidak langsung) dapat menjelaskan variasi variabel dependent (PDRB dan IPM) sebesar 93,5% atau variabel belanja langsung dan belanja tidak langsung dapat mempengaruhi PDRB dan IPM sebesar 93,5%. dapat pula dikatakan bahwa variasi variabel lain yang menjelaskan variasi PDRB dan IPM yang tidak diperhitungkan ke dalam model hanya sebesar 6,5%.

#### 3) Adjusted R Square = 0,891

Adjusted R Square merupakan koefisien determinasi yang telah dikoreksi dengan jumlah variabel dan ukuran sampel sehingga dapat mengurangi unsur bias jika terjadi penambahan variabel maupun penambahan ukuran sampel. Adjusted R Square sebesar 0,891 berarti variasi belanja langsung dan belanja tidak langsung dapat menjelaskan variasi PDRB dan IPM sebesar 89,1%. Atau variabel belanja langsung dan belanja tidak langsung mempengaruhi 89,1 % PDRB dan IPM.

#### 4) Standar Error of the Estimate = 0,059

Std. Error of the Estimate merupakan penyimpangan antara persamaan regresi dengan nilai dependent rillnya, yaitu sebesar 0,059 satuan variabel dependent (satuan variabel

dependent dalam penelitian ini adalah jutaan rupiah). Ini berarti besarnya penyimpangan sebesar 0,059 juta. Jumlah ini nilainya cukup kecil sehingga alat ini sangat baik untuk digunakan sebagai alat prediksi, karena secara teoritis dijelaskan bahwa semakin kecil nilai

standar error berarti semakin baik persamaan regresi tersebut sebagai alat prediksi.

**b. Analisis Tabel ANOVA<sup>b</sup> :**

Analisis ini digunakan untuk melihat pengaruh variabel independent secara simultan terhadap variabel dependent, adapun hasil olahan SPSS 16 seperti terlampir pada tabel berikut:

Tabel 2. ANOVA<sup>b</sup> :

Model	Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig
1 Regression	.485	2	.242	68.880	.003
Residual	.011	3	.004		
Total	.495	5			

*Sumber data: Data Olahan SPSS 16*

Dari hasil analisis data didapatkan nilai Uji F-Hitung adalah 68,88, sedangkan nilai F-tabel sebesar 19,64, yang berarti bahwa F-Hitung lebih besar dari F-tabel. Maka dapat diputuskan bahwa belanja langsung dan belanja tidak langsung secara simultan berpengaruh positif terhadap PDRB dan IPM. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima.

Begitupun jika melihat taraf signifikansi yang diperoleh dari hasil analisis sebesar 0,03

jauh lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikansi =0,05. Maka dapat diputuskan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh nyata terhadap variabel dependent. Hal ini lebih memperkuat bahwa model dinyatakan cocok atau *fit*.

**c. Analisis tabel Coefficients<sup>a</sup>**

Analisis ini digunakan untuk menentukan pengaruh variabel independent secara parsial terhadap variabel dependent.

Tabel 3. Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coeficient	t	Sig
	B	Std.Error			
(Constant)	5027	7.498		.670	.551
BL	-.434	.253	-.230	-.1.711	.186
BTL	.935	.157	.800	.5950	.009

*Sumber data: data Olahan SPSS 16.*

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai t hitung untuk belanja langsung sebesar -1.711, sementara nilai t tabel sebesar 3,182 berarti nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel, dan arah

koefisien negatif maka dapat disimpulkan bahwa variabel belanja langsung memiliki pengaruh yang negatif terhadap PDRB dan IPM Kabupaten Sinjai.

Sedangkan t hitung untuk belanja tidak langsung sebesar 5,950, sementara nilai t tabel sebesar 3,182 berarti nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, dan arah koefisiennya positif serta taraf signifikansinya sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Belanja tidak langsung memiliki pengaruh yang positif terhadap PDRB dan IPM Kab. Sinjai.

Hasil penelitian ini sangat menarik karena dari hasil analisis atau Uji t di atas

diketemukan bahwa untuk variabel belanja langsung ternyata berpengaruh negatif terhadap PDRB dan IPM. Hal ini disebabkan karena jika mencermati porsi alokasi anggaran untuk belanja langsung jauh lebih kecil dibandingkan dengan anggaran untuk belanja tidak langsung. Dapat pula dilihat bahwa untuk presentase alokasi anggaran belanja langsung dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan IPM  
Kabupaten Sinjai Tahun 2007-2013

Tahun	Belanja Langsung (Ribu Rupiah)	Belanja Tak Langsung (Ribu Rupiah)	IPM
2007	278.083.183	173.537.693	68,24
2008	299.354.396	205.025.090	68,74
2009	220.125.093	232.719.642	69,21
2010	204.595.720	245.881.174	69,53
2011	221.794.593	305.885.672	70,61
2012	200.357.566	365.433.390	71,64

Sumber: BPS Sinjai(data diolah)

Tabel di atas menunjukkan bagaimana alokasi anggaran belanja langsung yang terus mengalami penurunan. Padahal, secara teoritis dan fakta empiris menunjukkan pengeluaran pemerintah yang paling berpengaruh terhadap kinerja sosial ekonomi suatu daerah atau negara adalah belanja langsung. Hal ini bukan tanpa sebab karena memang pos anggaran yang berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB dan peningkatan IPM adalah belanja langsung khususnya belanja sektor publik seperti belanja sektor pendidikan, sektor kesehatan, serta sektor

infrastruktur. Belanja sektor publik yang dikonotasikan sebagai belanja yang terkait dengan kepentingan masyarakat, karenanya alokasi anggaran untuk sektor ini harus selalu ditingkatkan.

Adapun secara umum pengeluaran pemerintah daerah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hal ini lebih banyak disumbang oleh peningkatan untuk belanja tidak langsung yang selalu meningkat secara signifikan setiap tahun. Impact dari peningkatan belanja tersebut dapat terlihat oleh tabel di atas dimana kualitas

SDM Sinjai yang tercermin pada IPM masyarakat yang terus mengalami peningkatan. Ada satu hal yang perlu dicermati secara mendalam bahwa peningkatan kualitas IPM masyarakat Sinjai sebagaimana yang terlihat pada tabel di atas masih tergolong lambat. Belum lagi jika dikomparasikan dengan IPM Sulawesi-Selatan, IPM Sinjai masih berada di bawah. Padahal kabupaten Sinjai terkenal sebagai pelopor pendidikan dan kesehatan gratis. Jauh sebelum Pemerintah Pusat merealisasikan pendidikan dan kesehatan gratis, Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai telah merealisasikan program layanan kesehatan dan pendidikan dari SD sampai SMA.

Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan dan kesehatan adalah komposit dari IPM. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai mesti melakukan akselerasi, inovasi serta kreativitas dalam meramu kebijakan fiscal atau pengeluaran pemerintah (*Goverment Expenditure*) yang lebih menekankan atau memberi porsi yang cukup besar untuk belanja langsung tersebut.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya serta teori-teori yang telah dijelaskan pada bagian B dalam penelitian ini mengenai hubungan antara pengeluaran pemerintah kaitannya dengan peningkatan kualitas manusia dan ekonomi masyarakat.

## **E. Kesimpulan dan Rekomendasi**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengolahan data belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap PDRB dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sinjai, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, belanja langsung dan Belanja

tidak langsung secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB dan IPM, dimana setiap terjadi perubahan pada belanja langsung dan belanja tidak langsung maka akan diikuti oleh perubahan PDRB dan IPM.

Analisis secara parsial terbukti bahwa belanja tidak langsung berpengaruh positif terhadap PDRB dan IPM. Sementara itu, belanja langsung berpengaruh negatif terhadap PDRB dan IPM, hal ini disebabkan karena alokasi anggaran belanja langsung yang terus menurun dari tahun ke tahun.

Hasil penelitian ini selain menguatkan hasil penelitian sebelumnya yang membuktikan bahwa belanja langsung dan belanja tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB dan IPM, juga membuktikan hipotesa bahwa belanja langsung dan belanja tidak langsung diduga berpengaruh terhadap PDRB dan IPM.

### **2. Rekomendasi**

Atas dasar implikasi dari hasil pembahasan diatas, maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian yang secara umum menunjukkan bahwa belanja langsung dan belanja tidak langsung yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan PDRB dan IPM, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai diharapkan untuk tetap mempertahankan ataupun bahkan meningkatkan alokasi anggaran untuk kedua bidang tersebut.
- b. Belanja langsung yang pengaruhnya terhadap PDRB yang masih negatif/minim yang disebabkan oleh penurunan alokasi anggaran

- setiap tahun, oleh karena itu Pemda Kabupaten Sinjai diharapkan untuk memberikan alokasi anggaran yang cukup tinggi untuk belanja langsung tersebut.
- c. Melihat bahwa peningkatan IPM Kabupaten Sinjai yang masih tergolong lambat, maka diharapkan Pemerintah Daerah untuk memberikan porsi alokasi anggaran yang cukup besar untuk belanja sektor pendidikan dan kesehatan.
- d. Perlu dilakukan pemetaan mengenai komposit IPM yang menyebabkan peningkatan IPM yang masih lambat. Apa yang menyebabkannya? apakah terletak pada pendidikan, kesehatan atau daya beli masyarakat? Sehingga jika ini diketahui Pemda bersama BAPPEDA Kabupaten Sinjai dapat merumuskan arah yang jelas serta langkah yang tepat untuk mendorong peningkatan IPM di kabupaten Sinjai.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Arsyad, Lincoln. 2004. Ekonomi Pembangunan, Edisi ke-4. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Basri, Faisal. 2002. *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Brata, Aloysius Gunadi, 2004. *Analisis Hubungan Imbal Balik Antara Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Daerah Tingkat II di Indonesia*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian – Universitas Atma Jaya.
- BPS. 2013. Kabupaten Sinjai Dalam Angka 2013. Sinjai: BPS Sinjai.
- Cahyadi, Eka Putu. 2005. *Pelacakan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Di Kab/Kota Bali)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Indeks.
- Dumairy. 1997. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Eko, Sutoro. 2010. Desentralisasi dan Penanggulangan Kemiskinan, Pelajaran dari Enama Daerah. Dalam A Prasetyantoko., Bahagijo, Sugeng., Budiantoro, Setyo (Eds). *Pembangunan Inklusif, Prospek dan Tantangan Indonesia* (hlm. 347-403). Jakarta: LP3ES.
- Hadi Sasana. 2009. "Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah." *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol10, No. 1, Juni 2009, hal. 103-124
- Halim, Abdul. 2007. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hasan, Ikbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif)*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Jhingan, M.L. 2008. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Jonaidi, Arius. 2012. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*. Volume 1 Nomor 1, April 2012. Hal 140-164.
- Maharani, Nisa & Sasana Hadi (2010) *Pengaruh Realisasi Belanja Daerah Dan Angkatan Kerja Terhadap Output Dan Pendapatan Per Kapita (Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah)*. (Jurnal).
- Mangkoesoebroto, Guritno. 1994. *Kebijakan Ekonomi Publik Di Indonesia: Substansi dan Urgensi*, Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Pengantar Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan* Edisi Revisi. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Mulyaningsih, Yani. 2008. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik Terhadap Peningkatan Pembangunan Manusia dan Pengurangan Kemiskinan. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Musgrave, Richard. A dan Peggy B Musgrave. 1989. *Public Finance In Theory and*

- Practise. Fifth editiona. McGraw-Hill Book, international Edition 1989.
- Nursini. 2012 *Perencanaan dan Penganggaran Daerah; Teori dan Aplikasi*. Makassar: PPKED- FEUH.
- Oates, Wallace. 1993. *Fiscal Decentralization and Economic Development*. National Tax Journal, XLVI 237-243.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Raharjo, Adi 2006. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta, dan Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1982-2003 (Studi di Kota Semarang)*. Thesis Tidak Dipublikasikan. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro. Semarang. Melalui (<http://eprints.undip.ac.id/15375/>)> (12/02/2014)
- Ranis, Gustav. 2004. *Human Development and Economic Growth*. Paper.Economic Growth Centre. Yale University.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Todaro, M.P and S.C.Smith. 2002. *Economic Development, 8 edition*. United Kingdom: Pearson Addison Weasley.
- Tambunan, Tulus. 2000. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Welzel, Christian, et.al. 2002. *The Theory of Human Development A Cross Cultural Analysis*. University of Calivornia, Irvine.
- Whithaker, William H. And Frederico, Ronald C. 1997. *Social Welfare in Today's World*. Second Edition. New York: The McGraw-Hill Companies.
- Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.